



JURNAL KONSTITUSI

Volume 10 Nomor 1, Maret 2013

- ◉ Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu
Janedjri M. Gaffar
- ◉ Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yang Agung
Dudu Duswara Machmudin
- ◉ Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012)
Eddy Rifai
- ◉ Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu
Iskandar Muda
- ◉ Politik Deliberatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan: Analisis Structures and Meanings Atas PP RI No. 28/ 2008
Fahrul Muzaqqi
- ◉ Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Pemilukada
Mariyadi Faqih
- ◉ Implikasi *Re-Eksistensi* Tap MPR dalam *Hierarki* Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia
Dian Agung Wicaksono
- ◉ Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)
Winda Wijayanti

JK	Vol. 10	Nomor 1	Halaman 001- 204	Jakarta Maret 2013	ISSN 1829-7706
----	---------	---------	---------------------	-----------------------	-------------------

Terakreditasi Nomor: 412/AU/P2MI-LIPI/04/2012

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii - vi
Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu Janedjri M. Gaffar	001-032
Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yang Agung Dudu Duswara Machmudin	033-048
Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012) Eddy Rifai	049-068
Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu Iskandar Muda	069-088
Politik Deliberatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan: Analisis <i>Structures and Meanings</i> Atas PP RI No. 28/ 2008 Fahrul Muzaqqi	089-116